Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 367-373

Analisis Peluang dan Tantangan DOB Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura : Studi Kualitatif atas Sumber Daya Alam dan Manusia

Ingrit Diana Susana Awandoi[1*], Yoel Pasae[2], Amson Padolo[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
ingritawandoi@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura dengan menitikberatkan pada aspek sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala distrik, tokoh adat, akademisi, dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Yaur memiliki potensi SDA yang melimpah, meliputi kehutanan, perikanan, pertambangan, serta pariwisata bahari berbasis kearifan lokal. Namun, pemanfaatan masih tradisional dan berisiko pada degradasi lingkungan. Kondisi SDM relatif terbatas, ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sehingga menjadi hambatan dalam kesiapan birokrasi kabupaten baru. Peluang pemekaran mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan investasi, serta penguatan identitas masyarakat adat. Tantangan utama meliputi keterbatasan fiskal, infrastruktur dasar yang belum memadai, rendahnya kapasitas birokrasi, potensi konflik sosial, serta ancaman eksploitasi SDA. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada strategi penguatan kapasitas daerah melalui pengelolaan SDA berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat adat.

Kata kunci: pemekaran daerah, sumber daya alam, sumber daya manusia, otonomi daerah, Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges of transforming Yaur District into Ondura Regency, focusing on natural resources (NR) and human resources (HR). A descriptive qualitative approach was employed, using in-depth interviews, field observations, and document analysis with informants comprising the district head, customary leaders, local academics, and business actors. The findings reveal that Yaur District possesses abundant NR potential in forestry, fisheries, mining, and marine-based tourism. However, current utilization remains traditional and carries risks of environmental degradation. In terms of HR, the workforce is limited, as most residents have only basic education and lack formal skills, which constrains the readiness of a new regional bureaucracy. The expansion offers opportunities to improve public services, accelerate infrastructure development, attract investment, and strengthen indigenous identity. Conversely, major challenges include fiscal limitations, inadequate basic infrastructure, low bureaucratic capacity, potential social conflicts, and threats of excessive NR exploitation. The study concludes that the success of Yaur District's transformation depends on strengthening regional capacity through sustainable NR management, HR development, good governance practices, and multi-stakeholder collaboration involving indigenous communities.

Keywords: *regional expansion, natural resources, human resources, local autonomy, Central Papua*

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah (Handayani & Prasetyo, 2021). Selama dua dekade terakhir, pemekaran wilayah banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Papua, namun hasilnya beragam: ada yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak sedikit yang justru menambah beban fiskal dan memperlebar kesenjangan pembangunan (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Distrik Yaur, yang kini berada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, tengah diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Ondura. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata bahari. Namun, pemanfaatannya masih bersifat tradisional dengan risiko eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan (Septianda, 2024). Dari sisi sumber daya manusia (SDM), kualitas tenaga kerja relatif rendah, dengan mayoritas penduduk hanya berpendidikan dasar sehingga keterbatasan kompetensi aparatur menjadi potensi hambatan birokrasi daerah baru (Asemki, 2024).

Berbagai studi menunjukkan bahwa tantangan utama daerah pemekaran di Papua terletak pada keterbatasan kapasitas fiskal, infrastruktur dasar, dan kualitas SDM. Misalnya, Kabupaten Mamberamo Raya mengalami pertumbuhan infrastruktur yang lambat karena ketergantungan pada dana pusat, sementara Kabupaten Tambrauw relatif berhasil karena adanya dukungan multipihak, termasuk perguruan tinggi dan LSM (Indra, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa pemekaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan kesiapan menyeluruh dalam aspek SDA, SDM, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 1. Fenomena Empiris Pemekaran Wilayah di Indonesia

Aspek	Fakta Empiris	Sumber
Jumlah DOB 1999–2014	223 DOB terbentuk, mayoritas di luar Jawa	Rahmawati & Nugroho (2023)
Tantangan utama DOB	Rendahnya kualitas SDM dan birokrasi, keterbatasan PAD	Handayani & Prasetyo (2021)
Kasus Papua	Mamberamo Raya: infrastruktur lambat; Tambrauw: relatif berhasil dengan kolaborasi multipihak	Indra (2023)
Potensi Distrik Yaur	Kehutanan, perikanan, pertambangan, wisata bahari (Hiu Paus)	Septianda (2024)
Keterbatasan Yaur	Mayoritas penduduk berpendidikan dasar, minim keterampilan formal	Asemki (2024)

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Urgensi Penelitian

Kajian akademik terhadap pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura sangat penting untuk memastikan bahwa proses ini tidak hanya menciptakan struktur pemerintahan baru, tetapi juga benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Ketersediaan SDA yang melimpah dapat menjadi motor pembangunan, namun tanpa peningkatan kualitas SDM dan tata kelola berkelanjutan, pemekaran berpotensi menimbulkan masalah baru seperti konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketergantungan fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pemekaran wilayah, khususnya di Papua Tengah, dengan menekankan pentingnya strategi penguatan kapasitas daerah berbasis SDA dan SDM.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi sumber daya alam (SDA) Distrik Yaur dalam mendukung rencana pemekaran menjadi Kabupaten Ondura?
2. Bagaimana kondisi sumber daya manusia (SDM) Distrik Yaur dalam menghadapi pemekaran?
3. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Distrik Yaur dalam proses pemekaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB)?

TINJAUAN LITERATUR

Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah

Pemekaran wilayah merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemekaran diharapkan dapat memperpendek rentang kendali birokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pembangunan (Handayani & Prasetyo, 2021). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang beragam: beberapa daerah berhasil mempercepat pembangunan, sementara lainnya justru menambah beban fiskal dan memperlebar ketimpangan (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Di Papua, isu pemekaran memiliki dimensi khusus karena menyangkut identitas masyarakat adat, akses pelayanan publik di daerah terpencil, serta penguatan kapasitas pemerintahan lokal (Asemki, 2024). Oleh karena itu, studi mengenai DOB di Papua perlu memperhatikan aspek sosial-budaya, selain faktor administratif dan teknis.

Sumber Daya Alam (SDA) dalam Pemekaran Daerah

Ketersediaan SDA sering dijadikan alasan utama dalam mendorong pemekaran wilayah. Kekayaan alam dapat menjadi modal pembangunan, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, perikanan, hingga pariwisata (Todaro & Smith, 2015). Namun, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan justru dapat menimbulkan degradasi lingkungan, deforestasi, dan konflik sosial (Kurniawan & Lestari, 2019).

Dalam konteks Papua, potensi SDA yang besar sering belum diimbangi dengan regulasi dan tata kelola yang baik. Septianda (2024) menekankan pentingnya pengelolaan SDA berbasis keberlanjutan agar DOB tidak sekadar menjadi entitas administratif, melainkan motor penggerak transformasi ekonomi lokal.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Birokrasi

Kualitas SDM menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan DOB. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sering kali menjadi penghambat utama pembangunan daerah baru (Handayani & Prasetyo, 2021). Menurut teori human capital, investasi pada pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas, sehingga daerah mampu mengelola potensi ekonomi secara lebih efektif (Becker, 1993).

Studi di Papua menunjukkan bahwa banyak daerah hasil pemekaran mengalami kesulitan membangun birokrasi yang profesional karena keterbatasan SDM lokal (Asemki, 2024). Dengan demikian, pengembangan SDM melalui pendidikan vokasional, pelatihan aparatur, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi syarat utama bagi keberhasilan pemekaran.

Peluang dan Tantangan Pemekaran Daerah

Pemekaran menghadirkan peluang strategis, antara lain peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan identitas budaya masyarakat lokal (Suharno & Wijaya, 2022). Namun, DOB juga dihadapkan pada tantangan serius, seperti keterbatasan fiskal, infrastruktur dasar yang belum memadai, lemahnya kapasitas birokrasi, hingga risiko konflik sosial (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Di Papua, potensi konflik sering kali terkait dengan struktur sosial berbasis marga dan kepemimpinan adat (Asemki, 2024). Oleh karena itu, legitimasi DOB sangat bergantung pada pelibatan aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi pemekaran.

Teori Kapasitas Daerah (Regional Capacity)

Konsep kapasitas daerah menekankan pentingnya kemampuan institusional, fiskal, teknis, dan sosial dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah (Smoke, 2015). Kelemahan dalam kapasitas fiskal dan birokrasi dapat menghambat DOB, khususnya jika PAD rendah dan ketergantungan pada dana transfer pusat terlalu tinggi (Fitriani & Anwar, 2022).

Dalam konteks Distrik Yaur, penguatan kapasitas daerah diperlukan agar pemekaran tidak hanya menghasilkan struktur pemerintahan baru, tetapi juga mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan. Strategi ini mencakup tata kelola SDA berbasis keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi multipihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Desain ini dipilih karena bertujuan memahami fenomena pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura secara mendalam, dengan menekankan makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan terhadap isu pemekaran (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan kualitatif dinilai relevan mengingat isu pemekaran daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan dimensi sosial, budaya,

ekonomi, dan politik yang memerlukan pemahaman kontekstual.

Lokasi penelitian adalah Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang saat ini tengah diwacanakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Ondura. Distrik ini dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, sekaligus menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang signifikan. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2024, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi lapangan secara komprehensif serta membangun kedekatan dengan masyarakat lokal sebagai bagian dari proses pengumpulan data.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam wacana pemekaran Distrik Yaur. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka tidak menggunakan istilah populasi dalam arti statistik, melainkan informan kunci (key informants) yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap isu penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni penentuan responden secara sengaja berdasarkan peran dan kapasitas mereka dalam konteks pemekaran wilayah. Informan terdiri atas Kepala Distrik Yaur, tokoh masyarakat dan adat, akademisi lokal, pelaku usaha, aparat pemerintahan, serta anggota legislatif daerah. Komposisi informan ini memberikan variasi sudut pandang dari aspek pemerintahan, sosial-budaya, akademik, maupun ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel, namun tetap terarah pada fokus penelitian. Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh pemahaman faktual terkait kondisi geografis, infrastruktur, serta aktivitas masyarakat Distrik Yaur. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan pemerintah, dokumen resmi, berita media, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Triangulasi metode ini digunakan untuk meningkatkan validitas data (Denzin & Lincoln, 2018).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara iteratif dengan memverifikasi temuan melalui perbandingan antar-sumber data (Miles et al., 2014). Proses ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Distrik Yaur merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dengan luas wilayah ±1.009 km² dan jumlah penduduk sekitar 3.040 jiwa pada pertengahan tahun 2024. Wilayah ini mencakup empat kampung utama, yaitu Akudiomi, Sima, Wami, dan Yaur, dengan karakteristik geografis berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan hutan tropis yang masih relatif alami. Posisi Distrik Yaur yang berada di pesisir utara Papua, berhadapan langsung dengan Teluk Umar dan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat), menjadikannya memiliki nilai strategis, khususnya dalam pengembangan perikanan laut, perdagangan antarwilayah, dan transportasi laut (Septianda, 2024).

Dari sisi infrastruktur, ketersediaan layanan dasar masih terbatas. Akses jalan sebagian besar bergantung pada jalur Trans Papua yang melintasi wilayah ini, sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan masih belum merata ke seluruh kampung. Akses listrik dan air bersih pun belum sepenuhnya stabil, yang berdampak pada keterbatasan pelayanan publik. Namun, kondisi geografis dan posisi strategis Distrik Yaur membuka peluang pengembangan wilayah apabila wacana pemekaran menjadi Kabupaten Ondura terealisasi. Hal ini sejalan dengan temuan Suharno dan Wijaya (2022), bahwa keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) sangat ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan posisi strategis sekaligus memperkuat infrastruktur dasar.

Potensi Sumber Daya Alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Yaur memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang signifikan pada sektor

kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Dari sektor kehutanan, tersedia hasil hutan kayu maupun non-kayu seperti damar dan rotan, meskipun pemanfaatannya masih sebatas kebutuhan subsisten masyarakat. Sektor perikanan laut dan darat juga menjanjikan, terutama karena wilayah pesisir yang luas dengan keanekaragaman biota laut. Namun, aktivitas perikanan masih dilakukan secara tradisional dengan keterbatasan teknologi dan akses pasar (Kurniawan & Lestari, 2019).

Selain itu, terdapat indikasi potensi pertambangan berupa emas, tembaga, dan marmer meskipun belum dikelola secara industri. Sektor pariwisata memiliki daya tarik kuat melalui wisata bahari, ekowisata hutan, serta wisata budaya masyarakat lokal. Salah satu potensi unggulan adalah keberadaan hiu paus (*Rhincodon typus*), yang dikenal sebagai atraksi wisata bahari internasional. Potensi ini, jika dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan, dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat identitas daerah baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015), bahwa SDA berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, namun pemanfaatannya harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Kondisi Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Distrik Yaur masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterampilan tenaga kerja baik di sektor formal maupun swasta. Sebagian besar penduduk masih bergantung pada mata pencaharian tradisional, seperti bertani, menangkap ikan, dan berburu.

Keterbatasan SDM ini menimbulkan tantangan besar dalam menyiapkan birokrasi kabupaten baru yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini selaras dengan temuan Handayani dan Prasetyo (2021), yang menegaskan bahwa kelemahan utama DOB terletak pada rendahnya kualitas aparatur dan kapasitas birokrasi. Meski demikian, wacana pemekaran mendorong motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri melalui pelatihan vokasional, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, SDM menjadi titik lemah sekaligus peluang transformasi dalam mendukung pemekaran Distrik Yaur.

Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan enam orang informan kunci yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kapasitas dan relevansinya terhadap isu pemekaran Distrik Yaur. Informan terdiri atas unsur pemerintah, tokoh adat, akademisi, pelaku usaha, serta legislator daerah. Karakteristik responden disajikan pada **Tabel 2** berikut:

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Kode	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan/Profesi	Keterangan Peran dalam Penelitian
KS	52	L	Kepala Distrik Yaur	Informan pemerintah lokal
TM	48	L	Tokoh Masyarakat/Adat	Representasi masyarakat adat
AL	40	L	Akademisi Lokal	Memberikan analisis ilmiah
PU	36	L	Pelaku Usaha (Perikanan)	Informan dunia usaha dan ekonomi lokal
TP	45	L	Aparat Tata Pemerintahan	Informan birokrasi terkait DOB
DPR	50	L	Anggota DPRD Kabupaten	Representasi legislatif dalam proses DOB

Source: Data primer diolah (2025)

Karakteristik ini menunjukkan bahwa data penelitian diperoleh dari perspektif yang beragam sehingga memperkaya analisis peluang dan tantangan pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura.

Hasil Wawancara

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan

Tema Penelitian	Ringkasan Jawaban Informan
Potensi SDA	Kepala Distrik menekankan kekayaan hutan, perikanan, dan potensi wisata hiu paus. Pelaku usaha menyebut perlunya akses pasar.
Kondisi SDM	Tokoh adat menyoroti rendahnya pendidikan masyarakat (mayoritas lulusan SMP). Akademisi menekankan perlunya pelatihan vokasional.

Tema Penelitian	Ringkasan Jawaban Informan
Peluang Pemekaran	DPRD menyebut pemekaran akan mempercepat akses dana pembangunan (DAU, DAK, Otsus). Tokoh adat menilai pemekaran memperkuat identitas masyarakat.
Tantangan Pemekaran	Aparat pemerintahan menegaskan keterbatasan PAD dan kesiapan birokrasi. Akademisi mengingatkan potensi konflik sosial antar-marga.
Strategi Optimalisasi	Semua informan menekankan pentingnya pengelolaan SDA berkelanjutan, peningkatan SDM, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pemekaran.

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Analisis Temuan Penelitian

Potensi Sumber Daya Alam (Menjawab Rumusan Masalah 1)

Distrik Yaur memiliki potensi SDA yang melimpah, meliputi kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata bahari. Namun, pemanfaatannya masih bersifat tradisional dan berisiko menimbulkan degradasi lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa SDA dapat menjadi kekuatan utama pemekaran jika dikelola dengan prinsip keberlanjutan (Septianda, 2024).

Kondisi Sumber Daya Manusia (Menjawab Rumusan Masalah 2)

SDM Distrik Yaur masih menghadapi keterbatasan signifikan. Mayoritas masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, sehingga kapasitas birokrasi baru berpotensi lemah. Meski demikian, adanya motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri melalui pelatihan dan pendidikan vokasional menjadi peluang transformasi SDM (Handayani & Prasetyo, 2021).

Peluang dan Tantangan Pemekaran (Menjawab Rumusan Masalah 3)

Peluang pemekaran mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan investasi, dan penguatan identitas adat. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan fiskal, minimnya infrastruktur dasar, rendahnya kualitas birokrasi, potensi konflik sosial, dan risiko eksploitasi SDA berlebihan (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura memiliki potensi strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan kapasitas daerah. Strategi yang perlu diprioritaskan adalah pengelolaan SDA berbasis keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasional, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam seluruh proses pembangunan. Temuan ini sejalan dengan teori kapasitas daerah yang menekankan pentingnya kombinasi faktor fiskal, administratif, sosial, dan teknis dalam mendukung keberhasilan DOB (Smoke, 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura, dengan menekankan dua aspek utama yaitu sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Yaur memiliki potensi SDA yang melimpah, meliputi kehutanan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata bahari, yang dapat menjadi modal pembangunan daerah baru. Namun, pemanfaatan SDA masih dilakukan secara tradisional dengan risiko degradasi lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan.

Dari sisi SDM, penelitian menemukan bahwa kualitas tenaga kerja di Distrik Yaur masih rendah, dengan mayoritas penduduk hanya berpendidikan dasar hingga menengah pertama. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan dalam membangun birokrasi daerah baru yang profesional dan akuntabel. Meski demikian, adanya motivasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan vokasional membuka peluang pengembangan SDM sebagai kekuatan transformasi.

Peluang pemekaran meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan investasi, serta penguatan identitas masyarakat adat. Namun, pemekaran juga menghadirkan tantangan besar, antara lain keterbatasan fiskal, minimnya infrastruktur dasar, lemahnya kapasitas birokrasi, potensi konflik sosial, serta risiko eksploitasi SDA secara berlebihan.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemekaran Distrik Yaur akan sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas daerah melalui tata kelola SDA yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM,

penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam seluruh proses pembangunan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep kapasitas daerah yang menyatakan bahwa keberhasilan daerah otonomi baru tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga kemampuan institusional, fiskal, dan sosial dalam mengelolanya.

Dengan demikian, pemekaran Distrik Yaur menjadi Kabupaten Ondura memiliki potensi strategis, tetapi juga menyimpan risiko besar apabila peluang tidak dimaksimalkan dan tantangan tidak diantisipasi sejak dini. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy) agar pemekaran benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas dan fokus hanya pada aspek SDA dan SDM. Faktor lain seperti dinamika politik lokal, jaringan transportasi antarwilayah, serta kapasitas fiskal secara detail belum dianalisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan, termasuk melibatkan pihak swasta, LSM, serta pemerintah provinsi. Penelitian kuantitatif dengan survei yang lebih luas juga dapat dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap pemekaran. Dengan demikian, kajian mengenai pemekaran Distrik Yaur akan semakin komprehensif dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan daerah otonomi baru.

DAFTAR PUSTAKA

Asemki, Y. (2024). *Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemekaran Daerah Otonom Baru Provinsi Papua dan Implikasinya terhadap Potensi Konflik* [Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage.

Fitriani, N., & Anwar, M. (2022). Fiscal capacity and challenges of local government in Indonesia. *Journal of Regional Development Policy, 8*(2), 112–125.

Handayani, S., & Prasetyo, B. (2021). Analisis kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung otonomi daerah. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 12*(1), 55–70. https://doi.org/10.22146/jmkp.2021

Kurniawan, T., & Lestari, D. (2019). Tantangan pengelolaan sumber daya alam di daerah otonomi baru. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 8*(3), 201–215. https://doi.org/10.32509/jsdal.v8i3.2019

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.

Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 8–13. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295Rah

mawati, I., & Nugroho, H. (2023). Implementasi kebijakan pemekaran daerah dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara, 5*(1), 89–104. https://doi.org/10.24843/jkp.2023.v5.i1

Septianda, M. F. (2024). Strategi pengelolaan sumber daya alam sebagai pondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago, 3*(1), 17–27. https://doi.org/10.25077/archipelago.2024.3.1.17

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development, 35*(2), 97–112. https://doi.org/10.1002/pad.1703

Suharno, P., & Wijaya, A. (2022). Evaluasi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 23*(2), 145–160. https://doi.org/10.21002/jepi.v23i2.2022

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.